

KRISIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KESERUMPUNAN NUSANTARA : KASUS PEMBERONTAKAN OPM DI PAPUA

¹Yudhistira Deva Utama

(Email : devahutamaa2@gmail.com)

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Sub tema : *Sociology, History, Politics.*

ABSTRAK

Papua menjadi pusat perhatian global karena ketertarikan yang tumbuh di Australia terhadap isu hak asasi manusia di wilayah ini. Romantisme gerakan kemerdekaan di Australia dan mitos populer tentang Indonesia menambahkan lapisan kompleksitas dalam persepsi masyarakat Australia terhadap isu ini. Peran Australia di wilayah Papua, baik sebagai pendukung *sovereignty* Indonesia maupun sebagai pengawas hak asasi manusia, menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi dan respons terhadap isu hak asasi manusia di Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) disingkat sebagai kelompok pemberontak yang memiliki implikasi politik, ekonomi, dan militer yang serius. Media seringkali menyoroti *insurgency* OPM sebagai alasan untuk peningkatan keterlibatan militer Indonesia di Papua, yang menimbulkan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh kekuatan keamanan. Namun, representasi media terbuka terhadap penafsiran berbeda oleh masyarakat Papua dan pendukung internasional mereka menunjukkan bahwa isu ini tidak seadanya. Isu hak asasi manusia di Papua diharapkan dapat dicapai melalui dialog, namun memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan mekanisme negosiasi terbuka untuk memfasilitasi komunikasi antara perunding dan konstituen mereka. Pemerintah Indonesia telah mengubah status OPM menjadi organisasi teroris, alasan yang diberikan termasuk memfasilitasi hubungan pemerintah dengan kelompok tersebut, mendapatkan legitimasi, dan mengurangi persepsi hak asasi manusia. Tindakan represif aparat keamanan TNI-Polri terhadap KTB bukanlah pelanggaran HAM, melainkan memberikan rasa aman dan melindungi hak warga Papua. Dalam konteks global, isu hak asasi manusia di Papua menjadi sorotan karena ketertarikan yang tumbuh di Australia dan peran aktif pemerintah Indonesia dalam mengatur dan mengendalikan situasi di wilayah tersebut. Meskipun ada tantangan dan kesulitan, diharapkan melalui dialog, kerjasama, dan dukungan internasional, perdamaian dapat dicapai dan dijalin di Papua.

Kata Kunci : Isu Hak Asasi Manusia, Organisasi Papua Merdeka, Keserumpunan Nusantara

ABSTRACT

Papua is at the center of global attention due to growing interest in Australia in human rights issues in the region. The romanticism of the independence movement in Australia and popular myths about Indonesia add layers of complexity to the Australian public's perception of this issue. Australia's role in the Papua region, both as a supporter of Indonesian sovereignty and as a human rights monitor, is an important factor in shaping perceptions and responses to human rights issues in Papua. The Free Papua Organization (OPM) is abbreviated as a rebel group that has serious political, economic and military implications. The media frequently highlights the OPM insurgency as the reason for increased Indonesian military involvement in Papua, leading to reports of human rights violations by security forces. However, media representations that are open to different interpretations by the Papuan people and their international supporters show that this issue is not as simple as it seems. Human rights issues in Papua are expected to be achieved through dialogue, but require a more complex approach and open negotiation mechanisms to facilitate communication between negotiators and their constituents. The Indonesian government has changed the OPM's status to a terrorist organization, reasons given include facilitating government relations with the group, gaining legitimacy, and reducing perceptions of human rights. The repressive actions of the TNI-Polri security forces against KTB are not a violation of human rights, but rather provide a sense of security and protect the rights of Papuan people. In a global context, human rights issues in Papua are in the spotlight due to growing interest in Australia and the active role of the Indonesian government in regulating and controlling the situation in the region. Despite the challenges and difficulties, it is hoped that through dialogue, cooperation and international support, peace can be achieved and established in Papua.

Keywords: Human Rights Issues, Free Papua Organization, Nusantara Congregation

PENDAHULUAN

Masa kini, Papua menjadi pusat perhatian global, terutama karena ketertarikan yang tumbuh di Australia terhadap isu hak asasi manusia di wilayah ini. Ketertarikan ini dipengaruhi oleh romantisme gerakan kemerdekaan, mitos populer tentang Indonesia, dan peran Australia di wilayah tersebut. Romantisme gerakan kemerdekaan di Australia, yang terutama terkait dengan Papua, mencerminkan sebuah keinginan untuk melihat kondisi hak asasi manusia di wilayah tersebut secara langsung. Mitos populer tentang Indonesia, yang seringkali menyoroti negatifitas dan kekerasan, menambahkan lapisan kompleksitas dalam persepsi masyarakat Australia terhadap isu ini. Selain itu, peran Australia di wilayah Papua, baik sebagai pendukung sovereignty Indonesia maupun sebagai pengawas hak asasi manusia, menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi dan respons terhadap isu hak asasi manusia di Papua.



Gambar 1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Penggambaran media mengenai Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok pemberontak yang kejam memiliki implikasi politik, ekonomi, dan militer yang serius. Media seringkali menyoroti insurgency OPM sebagai alasan untuk peningkatan keterlibatan militer Indonesia di Papua, yang menimbulkan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh kekuatan keamanan. Namun, representasi media terbuka terhadap penafsiran berbeda oleh masyarakat Papua dan pendukung internasional mereka menunjukkan bahwa isu ini tidak seadanya. Masyarakat Papua seringkali melihat OPM sebagai gerakan kemerdekaan yang berjuang untuk hak asasi manusia mereka, sementara pendukung internasional melihat mereka sebagai kelompok yang berjuang melawan penindasan dan diskriminasi.

Perdamaian di Papua diharapkan dapat dicapai melalui dialog, namun memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan mekanisme negosiasi terbuka untuk memfasilitasi komunikasi antara perunding dan konstituen mereka. Pemerintah Indonesia telah mengubah

status OPM menjadi organisasi teroris, alasan yang diberikan termasuk memfasilitasi hubungan pemerintah dengan kelompok tersebut, mendapatkan legitimasi, dan mengurangi persepsi hak asasi manusia. Tindakan represif aparat keamanan TNI-Polri terhadap KTB bukanlah pelanggaran HAM, melainkan memberikan rasa aman dan melindungi hak warga Papua.

Para profesional medis internasional memainkan peran penting dalam membawa perubahan di Papua Barat dengan melibatkan para profesional kesehatan Papua yang progresif, mendukung layanan, program pelatihan, dan meningkatkan standar perawatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia dasar yang harus dijaga, dan dengan dukungan profesional medis internasional, peningkatan akan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua diharapkan dapat meningkat.

Dalam konteks global, isu hak asasi manusia di Papua menjadi sorotan karena ketertarikan yang tumbuh di Australia dan peran aktif pemerintah Indonesia dalam mengatur dan mengendalikan situasi di wilayah tersebut. Meskipun ada tantangan dan kesulitan, diharapkan melalui dialog, kerjasama, dan dukungan internasional, perdamaian dapat dicapai dan dijalin di Papua.

KRONOLOGI OPM

Organisasi Papua Merdeka (OPM), didirikan pada tahun 1965, bertujuan memisahkan antara Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dari pengendalian Indonesia dan mencapai kemerdekaan wilayah tersebut. Sejak pembentukannya, OPM telah mengadopsi berbagai strategi, termasuk dialog antar diplomat, pengibaran bendera dengan simbol Bintang Kejora, dan tindakan militer dalam konteks konflik di Papua. Simbol-simbol persatuan Papua, seperti bendera Bintang Kejora, lagu nasional "Hai Tanahku Papua", dan lambang negara yang digunakan sebelum pemerintahan Indonesia pada Mei 1963, sering digunakan oleh pendukung OPM. Deklarasi pembentukan OPM menolak semua bentuk perkembangan, termasuk kelompok yang melibatkan tokoh agama, lembaga kemanusiaan, dan lembaga pemerintah, dengan slogan "Tolong tinggalkan kami sendiri!" OPM mengadakan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora setiap 1 Desember, sebagai hari yang dianggap sebagai hari kemerdekaan mereka. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh polisi Indonesia, dengan sanksi hukum yang dapat mencapai 20 tahun penjara.



Gambar 2. Kelompok Separatis OPM

Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengalami perpecahan strategis antara Roemkolem dan Prai, yang menghasilkan dua fraksi utama: PEMKA, yang dipimpin oleh Prai, dan TPN, yang dipimpin oleh Roemkolem. Perpecahan ini berdampak pada kemampuan OPM sebagai kekuatan politik.

Mulai dari tahun 1976, OPM mulai mengirimkan surat ancaman ke Freeport Indonesia, meminta kerjasama dalam program Spring Rebellion. Pada tahun 1984, OPM melakukan serangan ke Jayapura, yang didominasi oleh warga Indonesia non-Melanesia, dan serangan tersebut cepat ditangani oleh militer Indonesia. Pada 14 Februari 1986, PT. Freeport Indonesia menerima informasi jika OPM aktif kembali di wilayah mereka, serta pendugaan beberapa karyawan Freeport sebagai anggota simpatisan OPM.

Ketidakberhasilan yang terjadi menyebabkan perpindahan pengungsi di Papua menuju kamp-kamp di daerah Papua Nugini yang didukung oleh OPM. Pada 18 Februari, OPM mengirimkan peringatan bahwa akan terjadi hujan di Tembagapura pada 19 Februari, yang kemudian diikuti oleh sabotase terhadap infrastruktur Freeport. Pada 14 April 1986, OPM melakukan sabotase lebih lanjut, memotong pipa, kabel listrik, dan merusak pipa ledeng, serta membakar karet ban. Insiden-insiden ini memaksa Freeport meminta bantuan polisi dan militer. Pada bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menangkap beberapa warga negara Indonesia dan Eropa, dengan dua orang diantaranya dibunuh dan dibebaskan.

Pada Juli 1998, OPM melakukan pengibaran bendera di menara air di Biak, tetapi mereka ditangkap dan dibubarkan oleh pasukan Indonesia. Pada 24 Oktober 2011, Kapolsek Mulia Domingus Octavianus Orth ditembak mati di Bandara Mulia di Puncak Jaya, dengan polisi Indonesia mencurigai pembunuhnya adalah anggota OPM. Serangkaian penyerangan yang dilakukan kepada polisi Indonesia mengharuskan peningkatan kehadiran polisi di Papua.

Pada 21 Januari 2012, OPM membunuh dan menembak penjaga toko yang merupakan seorang warga sipil. Pada 8 Januari tahun 2012, OPM melakukan penyerangan terhadap angkutan umum bus, menyerang tiga warga sipil dan seorang anggota TNI yang berada dilokasi. Kasus lainnya yang terjadi yaitu ditangkapnya anggota OPM yang membawa membawa Narkoba pada 31 Januari 2012

Tanggal 8 April tahun 2012, OPM melakukan penyerangan terhadap pesawat komersial maskapai Trigana Air yang melakukan *landing* di Bandara Mulia, daerah Puncak Jaya, Papua, yang menyebabkan kehilangan kendali dan tabrakan dengan gedung, menyebabkan luka pada beberapa korban. Pada tanggal 1 Juli 2012, tim yang melakukan patroli keamanan rutindiserang oleh OPM yang mengakibatkan kematian satu warga sipil. Pada 9 Juli 2012, tiga orang tewas dalam serangan di Paniai, Papua, dengan korban termasuk anggota TNI dan warga sipil, termasuk anak laki-laki berumur delapan tahun yang ditembak di dadanya.



Gambar 3. Korban Konflik OPM di Papua

Sebelum perpecahan strategis antara Roemkolem dan Prai yang memisahkan OPM menjadi dua fraksi utama, TPN/OPM adalah satu kesatuan yang terorganisir secara struktural, yang menduduki posisi Presiden dalam Pemerintahan sementara Papua Barat yaitu Seth Roemkolem dan Jacob Pry menjadi Presiden Senat. Pada masa itu, OPM mencapai puncak organisasi dan manajemennya. OPM diakui keberadaanya oleh Pemerintah Senegal dan mengizinkan pembukaan kedutaan besar di Dakar dengan Tangama menjadi duta besarnya. Sebagai pasukan militer dari OPM, Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang dibentuk di Victoria pada tanggal 26 Maret 1973, beberapa tahun setelah Papua Barat memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Juli 1971. Pelanggaran hak asasi manusia

terus terjadi, namun terjadi peningkatan jumlah kematian akibat letnan, termasuk kasus Octovianus Autumn yang ditembak oleh OPM di Papua pada 13 April 2024 pukul 03.46 WIB.

KESIMPULAN

Isu hak asasi manusia di Papua menjadi sorotan global karena ketertarikan yang tumbuh di Australia terhadap masalah tersebut. Romantisme gerakan kemerdekaan di Australia, mitos populer tentang Indonesia, dan peran Australia di wilayah Papua menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi dan respons terhadap isu hak asasi manusia di Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) disingkat sebagai kelompok pemberontak yang memiliki implikasi politik, ekonomi, dan militer yang serius. Media seringkali menyoroti insurgency OPM sebagai alasan untuk peningkatan keterlibatan militer Indonesia di Papua, yang menimbulkan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh kekuatan keamanan. Namun, representasi media terbuka terhadap penafsiran berbeda oleh masyarakat Papua dan pendukung internasional mereka menunjukkan bahwa isu ini tidak seadanya. Isu hak asasi manusia di Papua diharapkan dapat dicapai melalui dialog, namun memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan mekanisme negosiasi terbuka untuk memfasilitasi komunikasi antara perunding dan konstituen mereka. Pemerintah Indonesia telah mengubah status OPM menjadi organisasi teroris, alasan yang diberikan termasuk memfasilitasi hubungan pemerintah dengan kelompok tersebut, mendapatkan legitimasi, dan mengurangi persepsi hak asasi manusia. Tindakan represif aparat keamanan TNI-Polri terhadap KTB bukanlah pelanggaran HAM, melainkan memberikan rasa aman dan melindungi hak warga Papua. Para profesional medis internasional memainkan peran penting dalam membawa perubahan di Papua Barat dengan melibatkan para profesional kesehatan Papua yang progresif, mendukung layanan, program pelatihan, dan meningkatkan standar perawatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia dasar yang harus dijaga, dan dengan dukungan profesional medis internasional, peningkatan akan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua diharapkan dapat meningkat. Dalam konteks global, isu hak asasi manusia di Papua menjadi sorotan karena ketertarikan yang tumbuh di Australia dan peran aktif pemerintah Indonesia dalam mengatur dan mengendalikan situasi di wilayah tersebut. Meskipun ada tantangan dan kesulitan, diharapkan melalui dialog, kerjasama, dan dukungan internasional, perdamaian dapat dicapai dan dijalin di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2006). Selective Outrage and Unacknowledged Fantasies: Re-thinking Papua, Indonesia and Australia. *Policy and Society*, 25, 121 - 130. [https://doi.org/10.1016/S1449-4035\(06\)70093-5](https://doi.org/10.1016/S1449-4035(06)70093-5).
- Kirksey, S., Roemajauw, J., Kirksey, E., & Roemajauw, A. (2002). The Wild Terrorist Gang: The Semantics of Violence and Self-determination in West Papua. *Oxford Development Studies*, 30, 189 - 203. <https://doi.org/10.1080/13600810220138294>.
- Kivimäki, T. (2006). Initiating a peace process in Papua : actors, issues, process, and the role of the international community. *Policy Studies*.
- Kusuma, A., Setiawan, M., Ilmar, A., & Situmeang, N. (2022). PERUBAHAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) MENJADI ORGANISASI TERORIS OLEH PEMERINTAH INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*. <https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.6087>.
- Rees, S., & Silove, D. (2007). Speaking out about human rights and health in West Papua. *The Lancet*, 370, 637-639. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61318-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61318-X).
- Syamsir, R. (2022). STRATEGIES AND POLICIES IN ENFORCEMENT OF SECURITY, HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT IN PAPUA. *Journal of Terrorism Studies*. <https://doi.org/10.7454/jts.v4i1.1042>.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)



Lampiran 2. Kelompok Separatis OPM



Lampiran 3. Korban Konflik OPM di Papua